



BPS

Akan Survei Ibu-Ibu terkait Biaya Hidup

JOGJA, Radar Jogja - Menyusul adanya perubahan pola konsumsi masyarakat saat pandemi, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan pada tahun 2022 mendatang. Salah satunya Survei Biaya Hidup



Sugeng Arianto

(SBH) 2022, untuk memperbaharui asumsi konsumsi yang terakhir dilakukan 2018 lalu. Kepala BPS DIJ Sugeng Arianto mengatakan, secara periodik survei tersebut seharusnya dilakukan setiap lima tahun sekali. Namun, melihat kondisi perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini dibandingkan tahun 2018 silam. "Tahun depan menjadi momen yang pas untuk melakukan survei ini. Nah tahun depan kami lakukan karena ada beberapa hal perubahan pola konsumsi," katanya saat konferensi pers di Kantor Diskominfosan kemarin (13/12).

Sugeng menjelaskan perubahan pola dasar saat ini yang digunakan masyarakat sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Terutama diakibatkan oleh pemanfaatan teknologi informasi, pandemi Covid-19 maupun revolusi industri 4.0. Terlebih saat pandemi, masyarakat banyak sekali yang justru berbelanja online di e-commerce. Begitu pula kebutuhan transportasi yang saat ini sudah ada ojek online. "Kondisi ini akan mempengaruhi perubahan pola konsumsi rumah tangga. Itu semua akan kami potret utuh melalui SBH," ujarnya.

Melandainya kasus Covid-19 yang ada di Indonesia ini, mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pembaharuan SBH. Sehingga hasil dari SBH nanti bisa memperoleh paket komoditas untuk memperbaharui Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. Sebanyak 1.600 rumah tangga yang akan disasar di Kota Jogja. Selain memotret pola perilaku konsumen, juga termasuk perubahan pasar serta jasa dan komoditas kebutuhan warga. "Jadi pada awal Januari 2022 kami akan mendatangi responden yang mayoritas ibu-ibu yang telah kami pilih untuk mengisi kuisioner. Mulai apa yang dia beli, apa yang dimakan. Tidak hanya makanan tapi juga kebutuhan non makanan," jelasnya.

Secara total ada 90 kota di Indonesia yang akan menjalani SBH. Diambah 68 kabupaten sebagai penunjang. Kabupaten Gunungkidul di DIJ akan akan menjalani SBH pertama kalinya. Sementara Kota Jogja, sejak awal masuk sasaran SBH karena merupakan representasi provinsi DIJ. "Nanti setiap 3 bulan sekali kami terus mengecek apa yang dibeli oleh warga hingga akhir 2022. Setiap triwulan ada 400 orang yang menjadi responden di kota Jogja," terangnya.

Pt Kepala BPS Kota Jogja, Rahmawati mengatakan sebanyak 14 kementren di Jogja akan menjalani SBH. Namun, pada triwulan pertama kementren Gondomanan tidak masuk survei. Melainkan akan diikutkan pada triwulan kedua hingga empat. "Teknisnya petugas akan mendatangi responden kemudian menyerahkan daftar. Setiap ibu rumah tangga yang sudah terpilih menjadi responden bisa mengisi kuisioner yang telah diberikan petugas," katanya. (wia/prs/f)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005